

DJKN

LAPORAN KINERJA

KPKNL JAKARTA I

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Jakarta I pada Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada pengguna jasa. Laporan Kinerja disusun untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Jakarta I telah menerapkan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai instrumen manajemen kinerja. Performa KPKNL Jakarta I dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Jakarta I Tahun 2023 sebesar 111,13%.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPKNL Jakarta I dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Rofii Edy Purnomo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur KPKNL Jakarta I	1
B. Peran Strategis KPKNL Jakarta I	8
C. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Penetapan/ Perjanjian Kinerja	10
B. Pengukuran Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	36
C. Capaian Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2023	36
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
B. Struktur Organisasi	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2023 merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN menuju *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2023 merupakan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian visi yang berpegang teguh pada visi DJKN yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, KPKNL Jakarta I mempunyai 5 misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Jakarta I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas, KPKNL Jakarta I menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;

6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continously Improved*). Pada tahun 2023 terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Jakarta I dengan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta. Secara umum pencapaian IKU pada Tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) IKU yang berada di bawah target. IKU yang belum mencapai target yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang.

KPKNL Jakarta I tidak akan berpuas diri dengan hasil yang telah diraih di Tahun 2023. Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan rencana aksi yang relevan. KPKNL Jakarta I akan terus bekerja dengan semangat nilai-nilai Kementerian Keuangan Integritas, Profesional, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa KPKNL merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai unit instansi vertikal, KPKNL melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Jakarta I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Susunan organisasi KPKNL Jakarta I adalah sebagai berikut :



Keterangan:

- Kepala Kantor : **Rofii Edy Purnomo**
 Kasubbag Umum : **Warsudin**
 Kasi Pengelolaan Kekayaan Negara : **Imam Arsandi**
 Kasi Piutang Negara : **Iraningsih**
 Kasi Hukum dan Informasi : **Agus Yulianto**
 Kasi Kepatuhan Internal : **Linda Susanti**
dan Para Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber daya manusia yang ada di lingkungan KPKNL Jakarta I per tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 41 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
S3	-	-	-	-	-
S2	-	-	4	5	9
S1/D IV	-	2	21	-	23
D III	-	2	3	-	5
SLTA/D I	-	-	4	-	4
SLTP	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4	32	5	41

2. Berdasarkan Gender

JENIS KELAMIN	Golongan				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Perempuan	-	3	15	4	22
Laki-laki	-	1	16	2	19
TOTAL	-	4	31	6	41

3. Tenaga Fungsional

	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Fungsional Pelelang	6
	Fungsional Pelelang Ahli Madya	1
	Fungsional Pelelang Ahli Muda	3
	Fungsional Pelelang Ahli Pertama	2
2.	Fungsional Penilai Pemerintah	5
	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda	2
	Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama	3
3.	Fungsional Pranata Keuangan APBN	1
	Fungsional Pranata Keuangan APBN Ahli Terampil	1
4.	Juru Sita Piutang Negara	1
5.	Pemeriksa Piutang Negara	1

Tugas dan Fungsi KPKNL Jakarta I berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2017 tentang Pembagian Tugas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

A. Pengelolaan Barang Milik Negara atas Kementerian Negara/Lembaga Negara/
Badan atau Komisi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Mahkamah Agung
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Kementerian Luar Negeri
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Kementerian Perhubungan
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
10. Kementerian Pemuda dan Olahraga

11. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 12. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional
 13. Badan Koordinasi Penanaman Modal
 14. Badan Narkotika Nasional
 15. Badan Pengawas Pemilihan Umum
 16. Badan Tenaga Nuklir Nasional
 17. Komisi Pemilihan Umum
 18. Ombudsman Republik Indonesia
- B. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi:
1. Barang Rampasan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
 2. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) Jakarta Pusat
 3. Hak atas kekayaan intelektual
 4. Benda Cagar Budaya yang belum ditetapkan statusnya sebagai BMN
 5. Aset eks. Bank Dalam Likuidasi
- C. Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Jakarta Pusat
2. Pelayanan Penilaian
- A. Objek Penilaian yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas:
1. Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan kekayaan negara lain-lain sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengelolaan kekayaan negara KPKNL Jakarta I
 2. Permohonan penilaian dalam rangka pengurusan piutang negara sesuai pembagian lingkup/wilayah kerja pengurusan piutang negara KPKNL Jakarta I
 3. Permohonan penilaian dan analisis yang terpisah untuk Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/Badan atau Komisi lingkup Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta I yang berdomisili di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta
- B. Objek Penilaian yang berada di wilayah Kota Jakarta Pusat atas permohonan penilaian dan analisis yang terpisah berupa
1. Sumber Daya Alam
 2. Kekayaan Negara yang Dipisahkan

3. Penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara
 4. Sitaan pajak
 5. Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah
 6. aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah
 7. aset lembaga/badan hukum non swasta lainnya
 8. sitaan kepolisian/Penyidik Pegawai Negeri Sipil
3. Pengurusan Piutang Negara
- Pengurusan Piutang Negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Penyerah Piutang:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 2. Kementerian Sekretariat Negara
 3. Kementerian Luar Negeri
 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
 6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 8. Badan Intelijen Negara
 9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 10. Badan Pusat Statistik
 11. Badan Standardisasi Nasional
 12. Badan Siber dan Sandi Negara
 13. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 14. Komisi Pemilihan Umum
 15. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 16. Lembaga Administrasi Negara
 17. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
 18. Ombudsman Republik Indonesia
 19. DJKN [Piutang Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) eks.penanganan Kejaksaan]
 20. Aset kredit eks BPPN yang berasal dari:
 - Bank Surya

- Bank Hokindo
- Bank Subentra
- Bank Umum Nasional
- Bank Danamon Indonesia
- Bank Bali
- Bank Risjad Salim Internasional
- Bank PDFCI
- Bank Niaga
- Bank Pos Nusantara
- Bank Sewu International
- Bank Sanho
- Bank Dharmala
- Bank Ciputra
- Bank Indonesia Raya
- Bank Danahutama
- Bank Central Dagang
- Bank Budi International
- Bank Orient
- Bank Sahid Gajah Perkasa
- Bank Dana Asia
- Bank Yakin Makmur
- Bank Namura Internusa
- Bank Tata
- Bank Pesona Kridayana
- Bank Putra Surya Perkasa
- Bank Mashill Utama
- Bank Baja International
- Bank Bumi Raya Utama
- Bank Bumi Daya
- Bank Dagang Negara
- Bank Ekspor Impor Indonesia
- Bank Pembangunan Indonesia

- Bank Negara Indonesia
- Bank Tabungan Negara
- Bank Mandiri
- Bank Universal
- Bank Jaya International
- Bank Perniagaan Umum
- Bank Pertiwi
- Bank Overseas Express
- Bank Permata
- Bank Prima Ekspres

21. Pemda DKI Jakarta

4. Pelayanan Lelang

A. Objek lelang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta atas Permohonan Lelang:

1. Eksekusi PUPN dari KPKNL Jakarta I
2. Balai Lelang
3. Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
4. Lingkup Kanwil DJP Jakarta Pusat
5. Lingkup Kanwil DJP WP Besar
6. Harta Pailit/Kurator domisili di Jakarta Pusat
7. Hak Tanggungan Kreditur:
 - a. PT Bank Mandiri
 - b. PT Bank Syariah Mandiri
 - c. Standard Chartered Bank
 - d. Bank Perkreditan Rakyat
 - e. Bank Perkreditan Rakyat Syariah
 - f. PT Bank OCBC NISP
8. Fidusia domisili Kreditur di Jakarta Pusat
9. Kementerian/ Lembaga Negara, Badan Layanan Umum, dan Pemohon Lelang lainnya yang termasuk dalam Pengelolaan Kekayaan Negara Jakarta I
10. Bank Indonesia
11. Pemerintah Daerah domisili di Jakarta Pusat
12. Badan Usaha Milik Negara/Daerah domisili di Jakarta Pusat

13. Balai Harta Peninggalan
14. Sukarela domisili Pemohon di Jakarta Pusat
15. Bank Dalam Likuidasi domisili di Jakarta Pusat
16. Pemohon Lelang domisili di luar Provinsi DKI Jakarta

B. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Jakarta I memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan kekayaan negara;

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Jakarta I turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Jakarta I selaku *asset manager* mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara;

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, pengurusan piutang negara difokuskan kepada piutang negara instansi pemerintah.

3. Memberikan pelayanan lelang;

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. KPKNL

Jakarta I tidak hanya melaksanakan lelang eksekusi tetapi juga melaksanakan lelang sukarela. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *Akta Van Transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Jakarta I diharapkan dapat berperan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap ke dalam pola pikir masyarakat, bahwa lelang adalah instrumen jual beli yang menguntungkan, sehingga berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan kontribusi pemasukan PNBPN ke Kas Negara

Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dari pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Bea Lelang Pegadaian. Kedua penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang ringkasan penetapan/perjanjian kinerja dan metode yang digunakan dalam mengukur kinerja tahun 2023.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja beserta analisisnya dibandingkan capaian tahun sebelumnya dan uraian atas realisasi anggaran yang digunakan.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

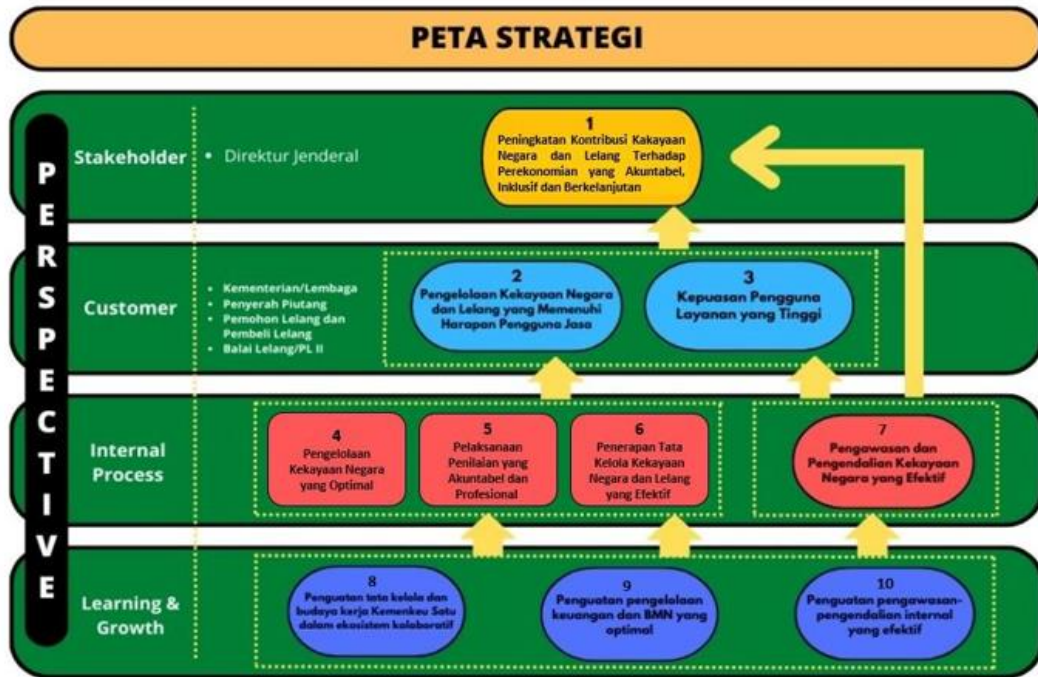
A. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal, visi dan misi KPKNL Jakarta I menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tertuang dalam Peta Kinerja Nomor PK- 01/WKN.07/2023.

Sasaran Strategis KPKNL Jakarta I Tahun 2023 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Jakarta I. Peta Strategi KPKNL Jakarta I Tahun 2023 memuat 10 Sasaran Strategis yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (4) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal; (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (6) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif; (7) Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif; (8) Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif; (9) Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal; (10) Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.

Peta strategi KPKNL Jakarta I mempunyai 4 perspektif, yaitu: stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective. Dari peta strategi KPKNL Jakarta I tahun 2023 tersebut untuk mencapai 10 Sasaran Strategis telah diidentifikasi sebanyak 20 Indikator Kinerja Individu.



B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja, KPKNL Jakarta I berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lain;
3. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Rincian capaian kinerja atas 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja (IKU) KPKNL Jakarta I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Indeks
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan			
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	129.08%	120%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	131.25%	120%
1c-CP	Indeks Integritas	88,6	89.17	100.56%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	72.20%	72.20%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	209.81%	120%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi			
3a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	106.40%	106.40%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal			
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	85.94%	120%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	111.15%	111.15%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	119.61%	119.61%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	13.50%	120%
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif			
6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	100%	106.38%
6b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	143.37%	120%
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif			

7a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	88.60%	103.02%
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif			
8a-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	97.20	120%
8b-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120%
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal			
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	113.33	113.33%
9b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	120%	120%
9c-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	1%	120%
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif			
10a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	100	100	100%
10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	93.31	120%

SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

K-Wide	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							
	1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max
Realisasi	14.40%	34.53%	34.53%	80.86%	80.86%	129.08%	129.08%	/TLK
Capaian	120%	115.10%	115.10%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	100% (Rp82.114.405.721)	100% (Rp46.595.194.894,02)	100% (Rp80.035.000.000)
Realisasi	105.80% (Rp106.958.949.890)	179.41% (Rp83.596.300.898)	147.73% (Rp118.231.592.390)
Persentase capaian	105,80%	179.41%	147.73%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	100% (Rp89.122.000.000 kemudian terdapat adendum sehingga target menjadi Rp91.622.000.000)	100% (Rp131.820.038.927)
Realisasi	179.41% (Rp180.314.391.844,50)	129.08% (131.820.038.927)
Persentase capaian	179.41%	129.08%

Realisasi IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp131.820.038.927. IKU ini mulai diukur kinerjanya pada tahun 2017. Realisasi tersebut didapat dari :

1. Realisasi nominal PNBPN Aset sebesar Rp105.844.152.798,00
2. Realisasi nominal PNBPN PN sebesar Rp14.440.836.270,00
3. Realisasi nominal PNBPN Lelang sebesar Rp11.535.049.859,00

2. Persentase Produktivitas Lelang

K-Wide	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							
	2.Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	51.46%	52.73%	52.,73%	59.38%	59.38%	131.25%	131.25%	
Capaian	120%	117.17%	117,17%	98.97%	98.97%	120%	120%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	32%	34%	35%
Realisasi	36,43%	37,43%	39,41%
Persentase capaian	113.85%	110,08%	112,61%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	36%	80%
Realisasi	45,47%	131.25%
Persentase capaian	126,31%	164.06%

Realisasi IKU Presentase produktivitas lelang pada tahun 2023 adalah 131,25% dengan persentase capaian sebesar 164.06%. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%. Produktivitas lelang dinilai dari 2 komponen dengan bobot 40% dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku dari per jenis lelang, yaitu dengan membandingkan lot lelang yang laku per jenis lelang (513 lot), jumlah lot lelang laku per jenis lelang dengan jumlah jenis lelang yang dilaksanakan (1.405 lot) dan 60% dari perbandingan jumlah realisasi frekuensi lelang (809) dan target frekuensi lelang (target frekuensi lelang untuk unit merupakan capaian tahun sebelumnya (739) capaian frekuensi lelang Tahun 2022).

3. Indeks Integritas

K-Wide	SS.1 Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							
	3. Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	88.67	88.67	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89.17	89.17	
Capaian	-	-	-	-	-	100.56	100.56	

	Tahun 2023
Target	88.67
Realisasi	89.17
Persentase capaian	100.56%

Realisasi IKU Indeks Integritas Tahun 2023 adalah 89.17 dengan persentase capaian sebesar 100.56% . Pencapaian IKU Indeks Integritas terdiri dari 3 komponen yaitu :

Komponen Penilaian A = Hasil Survei dan FGD

Komponen Penilaian B = Faktor Koreksi :

1. Keterjadian OTT/Fraud
2. Hasil Audit Investigasi
3. Pengondisian

4. Informasi APH

Komponen Penilaian C = Apresiasi

1. Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi
Perbaikan dari Hasil SPI
2. Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE1

SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

4. Persentase Realisasi Pokok Lelang

K-Wide	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	4.Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	14.10%	29.12%	29.12%	46.65%	46.65%	72.20%	72.20%	
Capaian	70.52%	72.80%	72.80%	66.64%	66.64%	72.20	72.20	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	100%	100%	100%
Realisasi	77,06%	121,43%	121,95%
Persentase capaian	77,06%	121,43%	121,95%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	100%	100%
Realisasi	148,52%	72.20%
Persentase capaian	148,52	72.20%

Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) pada tahun 2023 adalah 72.20%. Pencapaian tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU Realisasi Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) merupakan gabungan dari Target/realisasi pokok lelang kelas I dan Target/realisasi pokok lelang pengadaan.

Perhitungan pencapaian IKU ini pada tahun 2023 menggunakan formula:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II}}$$

Adapun rincian pencapaian sub-sub IKU tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pokok Lelang Kelas I

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	Rp359.717.000.000	Rp360.000.000.000	Rp383.000.000.000
Realisasi	Rp277.987.285.678	Rp483.308.581.132	Rp416.604.964.000
Persentase capaian	77,28%	134%	109%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	Rp388.000.000.000	Rp390.000.000.000
Realisasi	Rp576.539.889.492	Rp229.301.640.834
Persentase capaian	148,59%	58.79%

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Kelas I pada tahun 2023 adalah sebesar Rp229.301.640.834 atau tidak melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp390.000.000.000.

b. Jumlah Pokok Lelang Pegadaian.

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	Rp128.450.000.000	Rp98.200.000.000	Rp94.000.000.000
Realisasi	Rp98.189.732.400	Rp73.089.188.300	Rp165.080.089.000
Persentase capaian	76,44%	74%	176%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	Rp80.000.000.000	Rp80.000.000.000
Realisasi	Rp118.551.458.600	Rp110.058.048.300
Persentase capaian	148,19%	137.57%

Realisasi Jumlah Pokok Lelang Pegadaian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp110.058.048.300. Pencapaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp80.000.000.000.

5. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

K-Wide	SS.2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	5.Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/
Realisasi	35.50%	51.97%	51.97%	85.34%	85.34%	209.81	209.81	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara baru diukur di tahun 2020. Sebelumnya IKU ini merupakan komponen perhitungan untuk IKU Persentase hasil pengurusan piutang negara. Realisasi Persentase Hasil Pengurusan Piutang Negara pada tahun 2019 merupakan gabungan dari Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan dan Jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan.

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	Rp25.500.000.000	Rp241.655.058.525 (3% dari total Nilai Outstanding Piutang Negara dengan Berkas s.d. 31 Desember 2016 /Realisasi PNDS dengan kriteria berkas sd 31 Desember 2016	Rp261.983.673.163,57
Realisasi	Rp8.865.516.436,17	Rp167.069.926.416 (2,07% dari total Nilai Outstanding Piutang Negara dengan Berkas s.d. 31 Desember 2016 /Realisasi PNDSdengan kriteria berkas sd 31 Desember 2016	Rp485.564.042.443,12
Persentase capaian	34,77%	69%	185,34%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	Rp341.159.212.641,00 kemudian terdapat adendum sehingga target menjadi Rp512.000.000.000,00	Rp345.000.000.000
Realisasi	Rp 698.862.787.052,95	Rp723.854.222.707
Persentase capaian	136,50%	209.81%

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
- 5) Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap.

SS.3 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

6. Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan

K-Wide	SS.3 Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	6.Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%	Max/
Realisasi	5.11%	10.23%	10.23%	11.93%	11.93%	106.40%	106.40%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	108.47%	108.47%	106.40%	106.40%	

	Tahun 2023	
	Komponen I	Komponen II
Target	5	11
Realisasi	4.43	11
Persentase capaian	106.40%	

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL) merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

IKU ini mengukur IKPL (output) di tahun berjalan dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi SKPL tahun sebelumnya (proses) pada setiap Unit Eselon I/LNSW.

Perhitungan capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan pada Tahun 2023 terdiri dari 2 Komponen yaitu :

Komponen I = Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJKN

Komponen II = Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan pada Tahun 2022 terdapat 11 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh DKJN di Tahun 2023 dan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 11 rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti.

SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

7. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

K-Wide	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	7. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%	Max/TLK
Realisasi	-	95%	95%	82%	82%	85.94%	85.94%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	-	100% (99 NUP)	62% (273 NUP)
Realisasi	-	100% (99 NUP)	78,86% (274 NUP)
Persentase capaian	-	100%	127,2%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	65% (464 NUP)	68%
Realisasi	83,63% (464 NUP)	85.94%
Persentase capaian	128,7%	126.38%

IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK mulai diukur kinerjanya pada tahun 2020. Formula penghitungan IKU ini di tahun 2023 masih sama dengan formula tahun lalu, yaitu melingkupi perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan optimalisasi SBSK.

Realisasi IKU Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2023 adalah sebesar 126,38%.

8. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

K-Wide	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	8.Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/
Realisasi	-	49.54%	49.54%	57.97%	57.97%	111.15%	111.15%	TLK
Capaian	-	120%	120%	96.61%	96.61%	111.15%	111.15%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	100%	0	100%
Realisasi	100%	0	45,45%
Persentase capaian	100%	-	45,45%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	100%	100%
Realisasi	100%	111.15%
Persentase capaian	100%	111.15%

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah). Terdapat 4 Kategori dalam pelaksanaan pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN, yaitu :

K1 = Output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) dan update data tanah di Master Aset SIMAN serta validasi di valserah, realisasi pada kategori K1 adalah 140 NUP dari target sebesar 90 NUP sehingga capaiannya sebesar 64.28%.

K2 = Output berupa Peta Bidang Tanah (PBT)

Realisasi pada kategori K2 adalah 71 NUP dari target sebesar 7 NUP sehingga capaian untuk kategori K2 adalah sebesar 1.014%.

K3 = Output berupa Peta Bidang Tanah/Produk Lainnya

Realisasi pada kategori K3 adalah 235 NUP dari target sebesar 244 NUP sehingga capaian untuk kategori K3 adalah sebesar 96.31%.

K4 = Output berupa update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah)

Realisasi pada kategori K4 adalah 1.485 NUP dari target sebesar 1.497 NUP sehingga capaian untuk kategori K4 adalah sebesar 99.19%.

Total target NUP Tahun 2023 adalah sebesar 1.839 NUP dengan realisasi sebesar 2.044 NUP sehingga capaian untuk IKU IKU Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan adalah 111.15%.

9. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

K-Wide	SS.4 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	9. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/
Realisasi	8%	72%	72%	94.12%	94.12%	119.61%	119.61%	TLK
Capaian	80%	120%	120%	120%	120%	119.61%	119.61%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	10 BKPN	33 BKPN	33 BKPN
Realisasi	33 BKPN	31 BKPN (nilai menjadi 34,5 dengan pembobotan)	71 BKPN
Persentase capaian	330%	104,55%	215,15%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	40 BKPN	50 BKPN terdapat Addendum menjadi 51 BKPN
Realisasi	75 BKPN	61 BKPN
Persentase capaian	187, 50%	119.61%

IKU Persentase efektivitas penyelesaian BKPN baru mulai diukur pada tahun 2020. Sebelumnya IKU ini merupakan komponen perhitungan untuk IKU Persentase hasil pengurusan piutang negara. IKU Persentase Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas (SPPNL)
2. BKPN Penarikan (SPPNS)
3. BKPN Dikembalikan (SKPBN), dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

Realisasi Jumlah BKPN yang Dapat Diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 61 BKPN dari target 51 BKPN. Persentase capaian mencapai 119.61%.

SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

10. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

K-Wide	SS.5 Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	10. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Min/TLK
Realisasi	5%	3%	3%	23.53%	23.53%	13.50%	13.50%	
Capaian	120%	120%	120%	105.88%	105.88%	120%	120%	

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Target	-	-	30%
Realisasi	-	-	4,21%
Persentase capaian	-	-	185,98%

	Tahun 2021	Tahun 2022
Target	22%	19%
Realisasi	1,90%	4,35%
Persentase capaian	191,36%	177,11%

IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian baru mulai diukur pada tahun 2020. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Realisasi IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2023 adalah sebesar 13,50% dari target 25% sehingga capaiannya sebesar 146% (polarisasi IKU minimize atau pencapaian semakin kecil akan semakin bagus).

SS.6 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

11. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

K-Wide	SS.6 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	11. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Max/
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TLK
Capaian	106.38%	106.38%	106.38%	106.38%	106.38%	106.38%	106.38%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	90%	90%	92%
Realisasi	99.49%	100%	100%
Persentase capaian	110.54%	111,11%	108,70%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	92%	94%
Realisasi	100%	100%
Persentase capaian	108,70%	106.38%

Realisasi IKU Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction 2023 adalah sebesar 100%. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94%. Pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction dinilai dari berapa intensitas frekuensi lelang yang dilaksanakan secara *e-auction* maupun *e-conventional auction*. Dalam hal ini lelang di KPKNL Jakarta I telah dilaksanakan secara *e-auction* seluruhnya.

12. Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

K-Wide	SS.6 Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	12. Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	31.37%	49.65%	49.65%	108.55%	108.55%	143.37%	143.37%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	-	100% (98 NUP)	100% (157 NUP)
Realisasi	-	100% (134 NUP)	103,82% (163 NUP)
Persentase capaian	-	136,73%	103,82%
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Target	100%	100%	
Realisasi	103,82%	143.37%	
Persentase capaian	103,82%	143.37%	

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) baru mulai diukur pada tahun 2020. Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran

kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi Realisasi IKU implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2023 dapat melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Untuk jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya dapat terealisasi sebanyak 71 aset dari target 58 aset yang semula targetnya 51 dikarenakan ada addendum menjadi 58;
- 2) Untuk jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti Satker, dapat terealisasi 8 dari target 5.

SS.7 Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

13. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

K-Wide	SS.7 Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	13. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	50%	50%	50%	50%	86%	86%	Max/
Realisasi	-	50,78%	50,78%	65.95%	65.95%	88.60%	88.60%	TLK
Capaian	-	101.55 %	101.55%	120%	120%	103.02%	103.02%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	70%	80%	85%
Realisasi	87,21%	82%	100%
Persentase capaian	124,59%	102,5%	117,65%
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Target	85%	86%	
Realisasi	97,77%	88.60%	
Persentase capaian	115,02%	103.02%	

Penilaian IKU Tingkat tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN terdiri dari 4 komponen:

- a. Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2022 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN
- b. Jumlah Tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2023 yang telah direkam pada aplikasi SIMAN
- c. Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2022
- d. Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2023

Realisasi Tingkat tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN pada tahun 2023 adalah sebesar 88.60% sehingga capaian sebesar 103.02%. dari 120 jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL Jakarta I periode semester II Tahun 2022 sebanyak 105 yang ditindaklanjuti dan telah direkam pada aplikasi SIMAN dan dari 73 jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL Jakarta I periode semester I Tahun 2023 sebanyak 66 yang ditindaklanjuti dan telah direkam pada aplikasi SIMAN. Pengukuran kinerja IKU ini dapat tercapai dikarenakan KPKNL Jakarta I rutin melakukan pembinaan pada satker melalui sosialisasi dan surat.

SS.8 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif

14. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

K-Wide	SS.8 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	14. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	80	80	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	97.20	97.20	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	80	70	75
Realisasi	91,74	99,33	95,43
Persentase capaian	114,68%	114,68%	127,24%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	80	80
Realisasi	99,17	97.20
Persentase capaian	123,96%	121.50%

IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko bertujuan Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja dan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan pada Tahun 2022 IKU ini merupakan IKU Nilai Review Pengelolaan Kinerja sehingga pada Tahun 2023 terjadi perubahan Formula pada IKU ini. Formula IKU Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko Tahun 2023 sebagai berikut :

$$\text{Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko} = (\text{Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja} \times 60\%) + (\text{Indeks Kualitas Manajemen Risiko} \times 40\%)$$

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 25%
- 2) Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%
- 3) Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 30%
- 4) Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi) 15%

Aksi yang dilakukan dalam mencapai target IKU yaitu mendokumentasikan semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja di KPKNL Jakarta I dengan lengkap.

15. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30JP)

K-Wide	SS.8 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							
	15. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30JP)							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	117.07%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	87%	100%	100%
Realisasi	92,50%	120%	120%
Persentas ecapaian	106,32%	120%	120%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	100%	100%
Realisasi	120%	120%
Persentase capaian	120%	120%

Realisasi Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2023 adalah sebesar 120%. Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

SS.9 Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal

16. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran

K-Wide	SS.9 Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	16. Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	95.50	95.50	95.50	95.50	95.50	100	100	Max/TLK
Realisasi	89.46	90.76	90.76	95.20	95.20	113.33	113.33	
Capaian	93.63%	94.99%	94.99%	99.69%	99.69%	113.33%	113.33%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	95%	95%	95,5%
Realisasi	97,62%	100%	94,48%
Persentas ecapaian	103,19%	105,26%	98,93%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	95,5%	100
Realisasi	95,28%	113.33
Persentas ecapaian	99,77%	113.33%

Realisasi Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar 113.33 dari target sebesar 100 sehingga capaiannya adalah sebesar 113.33% telah melampaui dari target yang ditetapkan.

17. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

K-Wide	SS.9 Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	17. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	120%	120%	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	-	-	-
Realisasi	-	-	-
Persentas ecapaian	-	-	-

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	100%	100%
Realisasi	159%	120%
Persentas ecapaian	159%	120%

IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan mulai diukur tahun 2022. Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus proses pengajuan sertipikasi, pemanfaatan, aplikasi BMN dan Pemanfaatan aplikasi Pengadaan. IKU ini diukur dari 3 komponen, yakni :

- a. Proses Pengajuan Sertipikasi
- b. Pemanfaatan Aplikasi BMN
- c. Pemanfaatan Sistem pengadaan

Realisasi Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2023 adalah sebesar 120%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yaitu 100%.

18. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

K-Wide	SS.9 Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	18. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Min/TLK
Realisasi	5%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	-	-	12,50%
Realisasi	-	-	0,00%
Persentase capaian	-	-	200,00%

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	10,00%	15%
Realisasi	0,00%	1%
Persentase capaian	200,00%	193.33%

IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN merupakan IKU mulai diukur pada tahun 2021. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih Total Data Realisasi PNBP Biad PPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan Total Data Realisasi PNBP Biad PPN MAP 425785 pada aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN.
- 2) Selisih Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang PL I MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan Total Data Realisasi PNBP Bea Lelang PL I MAP 425782 pada aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN.

Realisasi Data PNBP Fungsional DJKN pada tahun 2023 adalah sebesar 1% dari target 15% (polarisasi IKU minimize atau pencapaian semakin kecil akan semakin bagus).

SS.10 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif

19. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK

K-Wide	SS.10 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							
	19. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100	100	
Capaian	-	-	-	-	-	100	100	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	-	-	-
Realisasi	-	-	-
Persentase capaian	-	-	-

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	-	100
Realisasi	-	100
Persentase capaian	-	100%

IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK merupakan Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Formula capaian IKU ini adalah sebagai berikut :

- Tidak lolos penilaian level TPE1 karena alasan fraud dan/atau pelanggaran integritas – 60
- Tidak lolos penilaian level TPE1 karena alasan non fraud – 70
- Tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM karena alasan fraud dan/atau pelanggaran integritas – 80
- Tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM karena alasan non fraud – 90
- Lolos penilaian level TPK dan berpredikat ZI-WBK/WBBM – 100

Tahun 2023 KPKNI Jakarta I berhasil meraih predikat ZI WBK sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450 Tahun 2023 Tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023.

20. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

K-Wide	SS.10 Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif							
	20. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	60	60	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	93.31	93.31	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	-	-	-
Realisasi	-	-	-
Persentas ecapaian	-	-	-

	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	-	60
Realisasi	-	93.31
Persentas ecapaian	-	155.52%

IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI

10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Realisasi IKU Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif Tahun 2023 KPKNI Jakarta I adalah sebesar 93.31 dari target sebesar 93.31 sehingga capaiannya sebesar 155.52%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai kegiatan dilingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I dalam Tahun 2023 telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023. Dari keseluruhan anggaran yang tersedia (PAGU akhir) yaitu sebesar Rp 2.271.049.000 pada tahun 2023, dapat terealisasi sebesar Rp 2.087.829.519 dari pagu yang telah ditetapkan.

Target PKPA tahun 2023 sebesar 95,5%, dan dapat terealisasi sebesar 113,33%. Sehingga pada Tahun 2023 Target PKPA dapat terpenuhi.

C. Capaian Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2023

Pada tahun 2023, KPKNL Jakarta I memiliki target pengembangan kompetensi pegawai sebesar 100%. Target tersebut dapat tercapai sebesar 120%, yang dihitung dari capaian jumlah jam pelatihan yang telah yang dicapai oleh 24 (dua puluh empat) pelaksana pada KPKNL Jakarta I.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN serta upaya peningkatan *good governance*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pada Tahun 2023 tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, lelang dan penilaian semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, jajaran KPKNL Jakarta I senantiasa berusaha menghadapi tantang tersebut, sehingga tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IKU secara keseluruhan pada Tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat 1 (satu) IKU yang realisasinya belum mencapai target yang ditentukan.

Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan KPKNL Jakarta I dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Melakukan penggalian potensi penerimaan dari Piutang Negara sehingga outstanding piutang negara dapat ditekan.
2. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara efektif.
3. Meningkatkan kualitas SDM agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pengguna jasa.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Jakarta I ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jakarta I, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kepala Kantor,

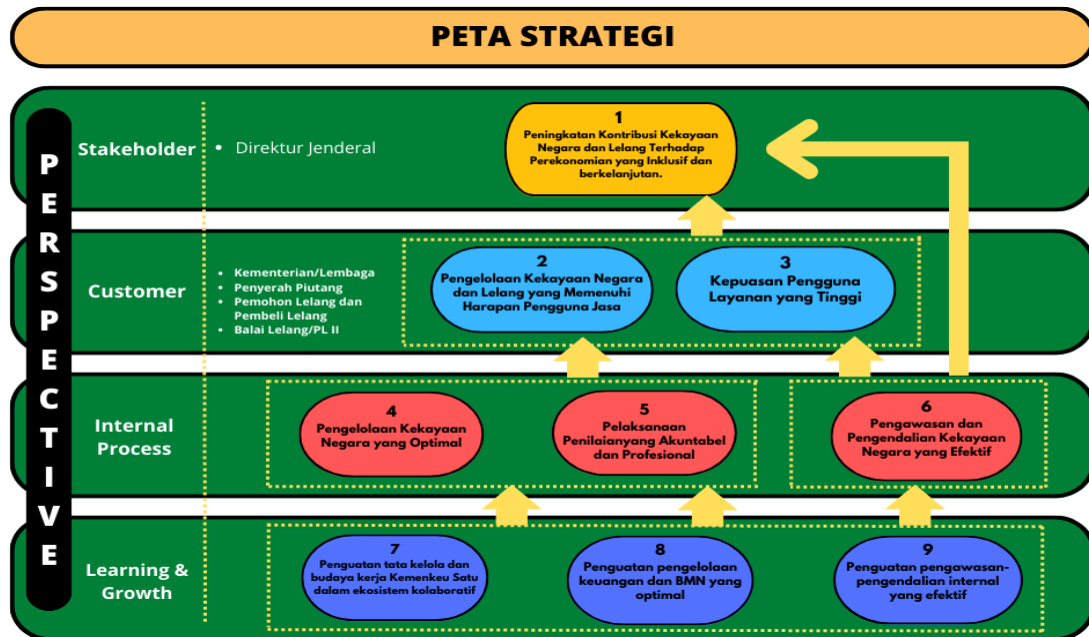


Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

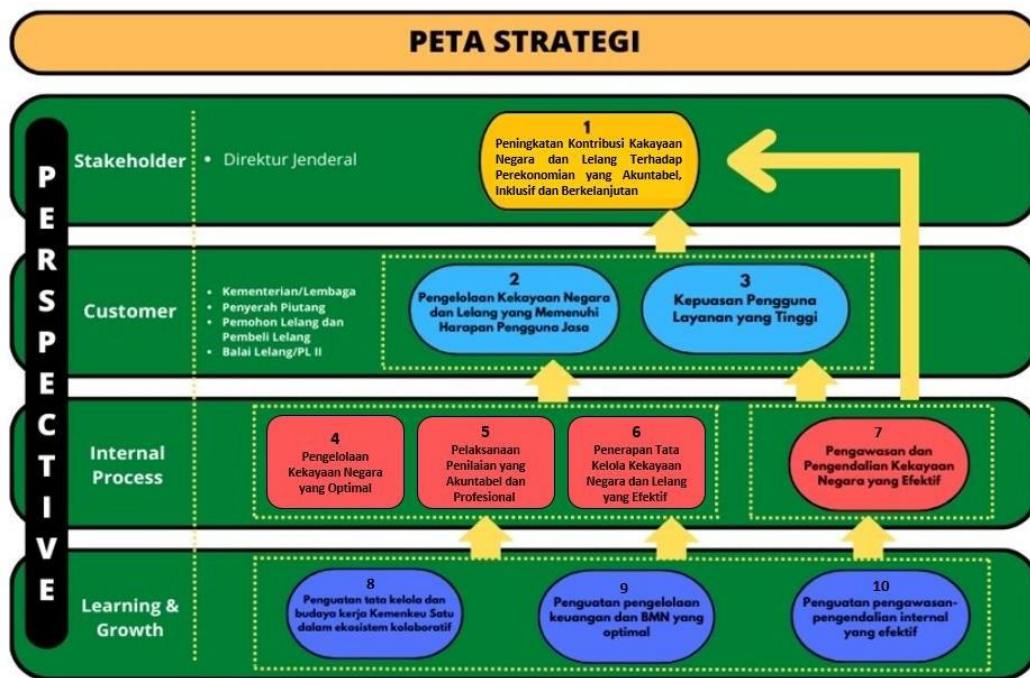
ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: 01.A/WKN.07/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-01/WKN.07/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Peta Strategis sebelum adendum:



b. Peta Strategis setelah adendum:



a. Perubahan Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Nomor SS	Nama Sasaran Strategis	Nomor SS	Nama Sasaran Strategis
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan

b. Penambahan Sasaran Strategis

Sebelum	Menjadi		Penjelasan
	Kode SS	Sasaran Strategis	
-	<i>Internal process perspective</i>		Sasaran Strategis (SS) ditambahkan sebagai sasaran dari pencapaian IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction serta IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif		

c. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU	Kode IKU/ Sub-IKU	Nama IKU/Sub-IKU
2d-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional	9d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	4b-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertipikatkan
4d-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	6b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
9c-N	Tingkat Pemenuhan Unit Kinerja terhadap kriteria ZI WBK	10a-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM

d. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	d Q3	Q4	Y			Q3	Sd Q3	Q4	Y
<i>Learning and growth perspective</i>						<i>Stakeholder perspective</i>					
9	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
9a-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	88,67	88,67
<i>Customer Perspective</i>						<i>Internal Process perspective</i>					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
2C-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E- Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%
<i>Internal Process perspective</i>						<i>Internal Process perspective</i>					

4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal					6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				
4d-N	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%	6b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
<i>Internal Process perspective</i>						<i>Learning and growth perspective</i>					
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					9	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal				
2d-N	Deviasi Data PNBP Fungsional	15%	15%	15%	15%	9d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

e. Penambahan IKU

Sebelum	Menjadi						Penjelasan
	Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				
			Q3	S.d. Q3	Q4	Y	
<i>Learning and growth perspective</i>							
-	9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan	-	-	100%	100%	Menjadi IKU baru pada Sasaran Strategis Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

f. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
9b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	Sub IKU dihapus dari PK Kepala KPKNL Jakarta I

g. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%

h. Perubahan Kode SS dan IKU

Kode SS/IKU		Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama
Sebelum	Menjadi	
6	7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
6a-CP	7a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
7	8	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
7a-N	8a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko
7b-N	8b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
8	9	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal
8a-CP	9a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran
9	10	Penguatan Pengawasan - Pengendalian Internal yang efektif
9d-N	10b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta

Jakarta, 27 September 2023 Kepala
KPKNL Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik Mahmudsyah



Ditandatangani Secara Elektronik Rofii
Edy Purnomo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA
KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA
MANDIRI

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

PERIODE PENILAIAN: 1 JULI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Rofii Edy Purnomo	1	NAMA	Mahmudsyah
2	NIP	197104101997031003	2	NIP	196407161991031001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
4	JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I	4	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta
5	UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I	5	UNIT KERJA	Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

A. UTAMA

1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	88,67	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jakarta)			
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	100%	Penerima Layanan
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	Proses Bisnis
6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis



NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95.5%)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI)	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI WBK/WBBM	100 (100%)	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran



NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jakarta)			

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA*	
1	Berorientasi pelayanan
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

PERILAKU KERJA*		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta

Jakarta, 27 September 2023 Kepala
KPKNL Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik
Mahmudsyah



Ditandatangani Secara Elektronik
Rofii Edy Purnomo





LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 16 JUNI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	42 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	-	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	80%	80%	80%	80%
3	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	70%	70%	100%	100%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	-	-	60%	60%	100%	100%

6	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan	-	-	-	11%	11%	100%	100%
7	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	-	-	55%	55%	68%	68%
8	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan	-	-	-	60%	60%	100%	100%
9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	-	-	60%	60%	100%	100%
10	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	-	-	25%	25%	25%	25%
11	Persentase Pelaksanaan Lelang E- Auction dan E-Conventional Auction	-	-	-	94%	94%	94%	94%
12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	75%	75%	100%	100%
13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	50%	50%	86%	86%
14	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	-	-	75%	75%	100%	100%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100	100	100
17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%

18	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	-	-	15%	15%	15%	15%
19	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan Zi WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100
20	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	-	-	60	60

KONSEKUENSI

1. *Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2. *Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta

Jakarta, 27 September 2023 Kepala
KPKNL Jakarta I



Ditandatangani Secara Elektronik Mahmudsyah



Ditandatangani Secara Elektronik Rofii
Edy Purnomo



STRUKTUR ORGANISASI KPKNL JAKARTA I

